

## **Kampus Bergerak**

Herdiansyah Hamzah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kampus-kampus keluar kandang melancarkan kritik terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kalangan civitas akademika menganggap kekuasaan hari ini gagal menjaga martabat demokrasi. Civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, tumpah ruah menyatakan keprihatinannya. Bahkan gerakan ini terus membesar dan meluas. Kalangan intelektual kampus ini menuntut agar Pemerintahan Jokowi bertanggung jawab penuh atas merosotnya cara pandang kita terhadap etika berbangsa dan bernegara. Mementum gerakan intelektual kampus ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap begitu banyak kebijakan kekuasaan yang abai terhadap nilai-nilai demokrasi. Alih-alih kekuasaan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, kekuasaan justru seolah mengorquestrasi kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

Reaksi kalangan civitas akademika ini adalah puncak dari kesabaran. Sebab pemerintahan Jokowi seperti enggan menerima kritik publik selama ini. Mengingatkan kita dengan *magnum opus* Jules Verne yang berjudul, “*Twenty Thousand Leagues Under The Sea*”. Verne menyebut istilah, “*Aures habent et non audient*”<sup>1</sup>, yang berarti punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak mampu berbicara. Demikianlah gambaran pemerintahan Jokowi yang tidak mampu membuka mata dan telinga atas kritik publik selama ini. Pemerintahan dijalankan seperti kaca mata kuda, yang tidak mampu melihat kiri kanan situasi rakyat-nya. Kritik tidak dianggap sebagai asupan yang menyehatkan pemerintahan, namun justru dimaknai sebagai hantu yang membahayakan.

## **Letupan Gerakan**

Gerakan civitas akademik diberbagai kampus ini, bukanlah tanpa sebab. Gerakan ini dibangun atas satu dasar pemikiran, pemerintahan Jokowi tidak lagi *on the track* dengan semangat demokrasi dan reformasi yang selama ini publik elu-elukan. Begitu banyak peristiwa yang memberikan pesan jika pemerintahan Jokowi gagal menjaga demokrasi untuk tetap tegak. *Pertama*, kehancuran lembaga-lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekuasaan dan para elit politik disekelilingnya telah mengkooptasi lembaga-lembaga tersebut. Berbagai kebijakan didesain sedemikian rupa agar lembaga-lembaga tersebut

---

<sup>1</sup> Buku ini dapat diunduh melalui link berikut ini : <https://books-library.net/files/books-library.online-12201129Vw2E1.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2024, Pukul 11.34 Wita.

dijalankan sesuai dengan selera dan kepentingan kekuasaan. MK misalnya, seolah tidak lagi bekerja untuk menjaga konstitusi, tapi telah dipolitisasi (*politization of judiciary*) untuk melapangkan jalan lahirnya dinasti politik Presiden Jokowi.

*Kedua*, pernyataan Presiden Jokowi yang secara eksplisit menyebut jika Presiden boleh memihak. Presiden boleh berkampanye dan memperlihatkan preferensi politiknya secara terbuka. Dan anehnya, pernyataan Presiden Jokowi ini diucapkan tepat disamping salah satu calon presiden. Pernyataan Presiden ini jelas keliru, sebab telah menggadaikan netralitasnya. Terlebih lagi anaknya sendiri adalah calon wakil presiden. Jadi mustahil bagi seorang Presiden Jokowi untuk bersikap objektif. Kecenderungan untuk memihak kepada anaknya, jelas akan selalu mengemuka. Ini termasuk bagian dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) secara terbuka. Keberpihakan Presiden Jokowi membuka ruang tindakan *abusive* yang merusak demokrasi kita. Apalagi seorang Presiden memegang penuh segala sumber daya negara, mulai dari aparaturnya hingga kebijakan, yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan kemenangan anaknya. Salah satunya adalah pemanfaatan bansos untuk mendongkrak suara, dimana bansos ini diharapkan mendapatkan imbal balik dalam bentuk suara dalam pemilihan nanti (*pork barrel politics*).

### **Menjaga Moral Publik**

Gerakan civitas akademika diberbagai kampus ini merupakan upaya untuk mengaktifkan moralitas publik. Yakni moral intelektual yang didasari oleh rasa kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat banyak. Setiap civitas akademika memikul moral publik ini, kapanpun dan dimanapun ia berada. Moral publik inilah yang menuntun sikap dan keberpihakan kita terhadap kemanusiaan, terhadap persoalan-persoalan rakyat banyak disekitar, terhadap kondisi bangsa dan negara. Siapapun yang berdiam diri atasnya, sama saja dengan membunuh hati nurani dan tanggung jawabnya sebagai civitas akademika. Sebab *habit* civitas akademika adalah kepekaannya terhadap persoalan disekelilingnya. Dalam sebuah pidatonya yang berjudul, "*Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia*", Muhammad Hatta memberikan pesan bagaimana seharusnya kaum intelektual bersikap. Menurut Hatta, kaum inteligensia Indonesia memiliki tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat. Sebab berdiam diri adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan<sup>2</sup>.

Oleh karena itu, moral publik yang harus terus dijaga. Dikembangkan disetiap kepala manusia yang masih berpikir waras. Civitas akademika harus mendobrak

---

<sup>2</sup> Bagian III Pidato Muhammad Hatta di Hari Alumni I Universitas Indonesia, 11 Juni 1957, yang diberi tajuk, "*Tanggung Jawab Moral Kaum Intelegensia*". Artikel ini dapat dibaca melalui link berikut ini : <https://nalarpolitik.com/sekolah-tinggi-arena-latihan-bertanggung-jawab/>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2024 Pukul 12.00 Wita.

dinding kampus dan bersenyawa dengan realitas di luar sana, realitas masyarakat yang menagih solidaritas kita. Civitas akademika itu tidak hanya bertugas memupuk ilmu dan pengetahuannya, tapi juga harus menggairahkan sisi kemanusiaannya. Civitas akademika dituntut untuk berempati terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh Rakyat banyak. Kampus harus terus bergerak sebagai bagian dari tugas sejarahnya sebagai intelektual publik. Kampus harus terus bersikap kritis terhadap kekuasaan, bukan justru membebek terhadapnya. Meminjam istilah Noam Chomsky dalam karya monumentalnya yang berjudul, “*The Responsibility of Intellectuals*”, kaum intelektual harus berada dalam posisi untuk mengungkap kebohongan pemerintah, untuk menganalisis tindakan sesuai dengan penyebab dan motif mereka, dan sering kali memiliki niat yang tersembunyi<sup>3</sup>. Teruslah bergerak!

Tulisan ini dimuat di kolom opini koran **Kaltim Post**, edisi Jumat 9 Februari 2024.

---

<sup>3</sup> Noam Chomsky. 1967. *The Responsibility of Intellectuals*. The New York Review of Books : New York. Dapat diakses melalui link berikut : <https://chomsky.info/19670223/>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2024, Pukul 14.46 Wita.